**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Arjawinangun kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Arjawinangun dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. **Bidang Sekretariat**
2. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Arjawinangun masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memdai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
3. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Arjawinangun, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi penjabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
4. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).
5. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan**
6. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Arjawinangun sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Arjawinangun terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
7. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
8. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehinggan perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
10. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
11. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.
12. **Bidang Tata Pemerintahan**
13. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
14. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
15. Masih rendahya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
16. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehinggan perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
17. **Bidang Pelayanan Umum**
18. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
19. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
20. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.
21. **Bidang Kesejahteraan Rakyat**
22. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
23. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
24. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.
25. **Bidang Ketentraman dan Ketertiban**
26. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
27. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Arjawinangun;
28. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
29. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.
    1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
30. **Visi**

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasi guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.disusun visi sebagai berikut :

“ **TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.**

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hinggal simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera : Sejahteran dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis : Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju : Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomia, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak;
5. Aman : Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanngsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.
6. **Misi**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Budaya : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Sejahtera : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Agamis : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Maju : Meningkatnya Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Aman : Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

**PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;
3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisatayang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama
   1. **Telaahan Renstra Perangkat Daerah**

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan menfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Arjawinangun dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Arjawinangun yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Arjawinangun yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Arjawinangun antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Arjawinangun masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memdai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Arjawinangun, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi penjabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan ,sehinggan perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
5. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai;
6. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
7. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.
   1. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kecamatan Arjawinangun ditujukan untuk perkembangan wilayah perumahan, industri batu alam, dan daerah wisata, yaitu daerah wisata kuliner di Desa Cikalahang dan Desa Agrowisata di Desa Kedongdong Kidul. Pemanfaatan pola ruang Kecamatan Arjawinangun sebagaiana tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Kabupaten Cirebon Tahun 2018 - 2038 adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Arjawinangun sebagai Pusat kegiatan perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
2. Kecamatan Arjawinangun sebagai Fungsi pelayanan memiliki peranan melayani desa yang berada di sekitarnya;
3. Kecamatan Arjawinangun merupakan jalur evakuasi bencana alam tanah longsor, banjir,letusan Gunung Api Ciremai;
4. Kecamatan Arjawinangun adalah salah satu Kawasan Perdagangan, merupakan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air;
5. Kecamatan Arjawinangun merupakan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya;
6. Kecamatan Arjawinangun merupakan Kawasan Peruntukan Pertambangan;
7. Kecamatan Arjawinangun merupakan Kawasan peruntukan pariwisata alam di Desa Geyongan;
8. Kecamatan Arjawinangun merupakan Kawasan Pertanian dan Holtikultura;
   1. **Penentuan Isu – Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada sub bab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun issu-issu strategis Kecamatan Arjawinangun.

**Tabel 3.1**

**Isu-isu  Strategis**

**Kecamatan ArjawinangunTahun 2019 – 2024**

| **ISU STRATEGIS** | **PERMASALAHAN** |
| --- | --- |
| Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik | * Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan; * Belum tertibnya administrasi dan pelaporan; * Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan; * Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; * Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat; * pelayanan belum berorientasi SOP. |